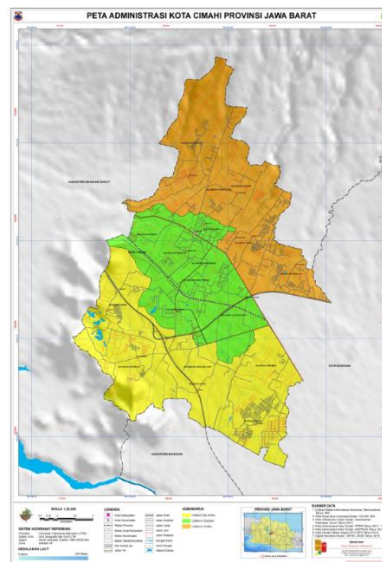


BAB II

TINGKAT KEKERASAN GENDER DAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN DI KOTA CIMAHI

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan di Kota Cimahi. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi terus meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2024, angka tersebut akan tetap tinggi. Wanita dapat mengalami lima jenis kekerasan terhadap diri mereka sendiri seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelanggaran dan eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan mental. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani kekerasan seksual di Kota Cimahi.

2.1 Gambaran Umum Kota Cimahi



Gambar 2 Peta Wilayah Kota Cimahi

Sumber: Peta Tematik Indo

Kota Cimahi terletak di Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cimahi Utara memiliki empat kecamatan, Kecamatan Cimahi Tengah memiliki enam kecamatan, dan Kecamatan Cimahi Selatan memiliki lima kecamatan. Bersama-sama, ketiga kecamatan ini terdiri dari total lima belas kecamatan. Dengan luas 17,41 km², atau 34,98 persen dari total luas Kota Cimahi, Kabupaten Cimahi Selatan memiliki luas lahan terbesar jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Luas daratan terkecil, 10,89 km², atau 31,73 persen dari total luas Kota Cimahi, berada di Kecamatan Cimahi Tengah, sedangkan Kecamatan Cimahi Utara menempati 14,13 km². Ini mencakup 4.025,73 hektar lahan, serta ruang di atas dan di dalam bumi. Kota ini terletak antara 60°50'00" dan 60°56'00" Lintang Selatan dan 107°30'30" hingga 107°34'30" Bujur Timur. Kota Cimahi dianggap sebagai penyangga Kota Bandung karena jaraknya hanya sekitar 7,5 kilometer. Selain itu, lokasi Kota Cimahi cukup menguntungkan karena dibantu dari berbagai jalur kegiatan ekonomi daerah. Jalan nasional yang menghubungkan Bandung dan Jakarta adalah jalur pertama; jalan tol Cileunyi-Padalarang-Purwakarta adalah jalur kedua; dan jalan tol Cileunyi-Padalarang-Purwakarta adalah jalur ketiga..

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Cimahi, 2022

Kecamatan dan Kota	Luas Wilayah Kota Cimahi (Km ²)
	2022
Cimahi Selatan	17,41
Cimahi Tengah	10,89
Cimahi Utara	14,13
Kota Cimahi	42,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi - *BPS Statistics of Cimahi Municipality*

Salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Cimahi. Secara geografis, wilayah ini adalah lembah cekungan yang miring ke selatan; bagian utara yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu kurang lebih 1.040 meter di atas permukaan laut (Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara), sedangkan bagian selatan yang mengarah ke Sungai Citarum kurang lebih 685 meter di atas permukaan laut (Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan).

2.1.2 Sosial Demografi Masyarakat Kota Cimahi

Tabel 2. 2 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Cimahi Selatan	249.839,0	...	42,29	14.334	101,8
Cimahi Tengah	165.571,0	...	28,03	15.204	101,6
Cimahi Utara	175.372,0	...	29,68	12.411	101,5
Cimahi	590.782,0	...	100,00	13.924	101,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi - *BPS Statistics of Cimahi Municipality*

Berdasarkan data dari BPS Kota Cimahi pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 590.782,0 jiwa. Kecamatan Cimahi Selatan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai 249,839 jiwa, diikuti oleh

Kecamatan Cimahi Utara dengan 175,372 jiwa, dan kecamatan Cimahi Tengah 165,571.

Mayoritas penduduk Kota Cimahi menggunakan Bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Sunda yang digunakan termasuk dialek tenggara yang tergolong halus karena mengenal undak usuk. Dalam masyarakat Cimahi, penggunaan bahasa Sunda menunjukkan pola yang dipengaruhi oleh nilai kesopanan dan penghormatan. Meskipun Cimahi telah berkembang menjadi kota urban dengan populasi yang beragam, budaya Sunda tetap terjaga, terutama dalam penerapan undak usuk basa.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi (Jiwa) Tahun 2022 - 2023

Status Pekerjaan Utama	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi (Jiwa)	
	2022	2023
Berusaha Sendiri	62.723	62.962
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	17.411	16.473
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	10.914	10.818
Buruh/Karyawan/Pegawai	161.356	163.287
Pekerja Bebas	11.274	10.501
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	22.360	18.357

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi - *BPS Statistics of Cimahi Municipality*

Berdasarkan data tersebut, Masyarakat Cimahi banyak yang bermata pencaharian sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai. Karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Tahun 2022 terdapat 161.356 penduduk dan tahun 2023 terdapat 163.287 penduduk. Dalam data tersebut, peningkatan terbesar terjadi

pada kategori Buruh/Karyawan/Pegawai dengan penambahan 1.931 jiwa. Untuk penurunan terbesar terjadi pada kategori Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar dengan penurunan sebanyak 4.003 jiwa. Pekerjaan Mandiri Stabil dalam kategori Berusaha Sendiri tetap stabil dengan adanya sedikit peningkatan.

2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tabel 2. 4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari Kota Cimahi tahun 2022 - 2023, berdasarkan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) sesuai hasil SP2010.

Kota - Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Umur Harapan Hidup_UHH Hasil SP2010)	
	2022	2023
Kota Cimahi	91,97	92,00
Jawa Barat	89,80	90,23

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Cimahi - BPS Statistics of Cimahi Municipality*

Menurut data tahun 2022, Kota Cimahi memiliki IPG sebesar 91,97. Sedangkan provinsi Jawa Barat memiliki IPG sebesar 89.80. Data ini menunjukkan pencapaian kesetaraan gender di Kota Cimahi sedikit lebih baik dibandingkan rata – rata di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023, Kota Cimahi mengalami kenaikan dari tahun 2022. Kenaikan IPG tersebut sebesar 92,00. Begitupun dengan tingkat provinsi, mengalami kenaikan sebesar 90,23. Kenaikan tersebut menunjukan kemajuan dalam aspek pembangunan gender. Kota Cimahi selalu memiliki nilai IPG lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Barat pada kedua tahun. Ini mencerminkan bahwa tingkat kesetaraan gender di Cimahi berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel 2. 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2022-2023

Kota - Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	2022	2023
Kota Cimahi	74,36	75,62
Jawa Barat	71,22	71,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi - BPS Statistics of Cimahi Municipality

Menurut data tahun 2022, Kota Cimahi memiliki IDG sebesar 74,36. Sedangkan Provinsi Jawa Barat memiliki IDG sebesar 71,22. Data ini menunjukkan Kota Cimahi memiliki pemberdayaan gender yang lebih baik dibandingkan rata – rata di Jawa Barat. Pada tahun 2023, Kota Cimahi mengalami kenaikan IDG dibanding tahun 2022 sebesar 75,62 Provinsi Jawa Barat mengalami hal yang sama, yaitu kenaikan IDG sebesar 71,74. Pada tahun 2023, Kota Cimahi dan Jawa Barat mengalami peningkatan pada IDG yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemberdayaan Perempuan. Nilai IDG Kota Cimahi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat menunjukkan bahwa perempuan di Cimahi memiliki peluang dan keterlibatan yang lebih baik dalam sektor ekonomi, politik, dan sosial.

Tabel 2. 6 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2022 – 2023

Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Persentase Keterlibatan di Parlemen	73,33	75,56	75,56	26,67	24,44	24,44
Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	49,01	53,25	51,31	50,99	46,75	48,69
Sumbangan dalam Pendapatan Kerja	69,81	69,26	69,23	30,19	30,74	30,77

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Cimahi - BPS Statistics of Cimahi Municipality*

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi alat penting untuk mengukur keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek strategis di masyarakat. Tabel yang disajikan memberikan gambaran mendalam mengenai komponen-komponen IDG, yang mencerminkan realitas gender di negara kita.

Salah satu indikator utama adalah persentase keterlibatan di parlemen. Data menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki tetap stabil, berada di atas 73% dari tahun 2021 hingga 2023, dengan angka terakhir mencapai 73,33%. Sebaliknya, keterlibatan perempuan masih jauh tertinggal, meskipun ada sedikit peningkatan dari 24,44% pada 2021 menjadi 26,67% pada 2023. Hal ini menandakan bahwa meski terdapat kemajuan kecil, perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam hal representasi politik.

Dalam sektor tenaga kerja, terutama di posisi manajerial dan profesional, terdapat perubahan yang lebih menggembirakan. Keterlibatan laki-laki menunjukkan dominasi dengan angka sekitar 49,01% pada 2023. Namun, perempuan juga menunjukkan kemajuan signifikan; angka mereka meningkat dari 46,75% pada 2022 menjadi 50,99% pada 2023. Tren ini mencerminkan upaya yang semakin baik dalam mencapai keseimbangan gender di sektor ini, meskipun kesenjangan masih ada.

Sumbangan terhadap pendapatan kerja, situasinya kembali menunjukkan kesenjangan yang mencolok. Kontribusi laki-laki terhadap pendapatan kerja tetap

stabil antara 69,23% hingga 69,81% selama tiga tahun terakhir. Di sisi lain, kontribusi perempuan stagnan di sekitar 30%, tanpa adanya peningkatan signifikan. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan imbalan yang setara dalam dunia kerja.

Secara keseluruhan, analisis IDG mengungkapkan adanya kesenjangan gender yang jelas. Laki-laki mendominasi semua indikator yang dianalisis, terutama dalam hal keterlibatan di parlemen dan sumbangan terhadap pendapatan kerja. Namun, ada harapan dengan adanya peningkatan positif bagi perempuan di dua komponen—keterlibatan di parlemen dan tenaga profesional—yang menunjukkan bahwa perubahan menuju kesetaraan gender sedang berlangsung. Meskipun demikian, stagnasi dalam kontribusi ekonomi perempuan menjadi tantangan yang perlu segera ditangani. Untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk memberdayakan perempuan dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, kita dapat berharap untuk melihat perubahan positif yang lebih signifikan di masa depan.

2.3 Tingkat Kekerasan Gender

Bagian ini akan menjelaskan seberapa sering terjadinya kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam masyarakat Kota Cimahi. Terdapat beberapa aspek, seperti Jenis Kekerasan, Faktor Penyebab, Dampak, Tingkat Kekerasan Berdasarkan Data, dan Upaya Penanganan.

2.3.1 Jenis Kekerasan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membedakan antara tiga kategori kekerasan dalam rumah tangga. Setiap tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, penyakit, atau cedera parah dianggap sebagai kekerasan fisik. Tindakan kekerasan psikologis adalah tindakan yang mengakibatkan rasa sakit mental, ketidakberdayaan, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, atau ketidakmampuan untuk bertindak. Memaksa hubungan seksual pada anggota rumah tangga atau individu lain untuk bisnis atau tujuan lain dikenal sebagai kekerasan seksual.

2.3.2 Faktor Penyebab

Faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap kekerasan seksual. Faktor internalnya adalah bahwa korban dan pelaku biasanya memiliki hubungan masa lalu, yang digunakan pelaku untuk melakukan serangan seksual. Hubungan intim antara korban dan pelaku merupakan salah satu elemen kunci yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Hubungan dekat antara pelaku dan korban memungkinkan pelaku kehilangan kendali diri atau kemampuan untuk mengawasi dirinya sendiri, yang pada akhirnya memberi pelaku kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual.

Selain faktor hubungan atau hubungan pelaku dengan korban, ada juga faktor peran pelaku dan posisi korban. Sebagai contoh, Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani menyatakan bahwa ada berbagai alasan mengapa perkosaan dapat terjadi. Salah satunya adalah pelaku memiliki rasa dendam pada korbannya, menjadikan

wanita lain yang tidak bersalah sebagai sasaran kemarahannya, atau menjadi korban sebagai kompensasi dari perbuatannya. Pengaruh faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan, seperti keinginan pelaku untuk menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahan, seperti film atau gambar yang tidak senonoh serta situasi dan keadaan yang mendukung perkosaan dan pelaku. Pelaku, korban, situasi, dan kondisi harus setidaknya termasuk dalam kasus perkosaan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Peran seseorang dalam mendorong perkosaan berbeda-beda (Wahid dan Irfan, 2001:66-67). Pendapat di atas menunjukkan bahwa emosi pelaku juga dapat berkontribusi terhadap pemerkosaan atau kekerasan seksual. Selain dari adanya dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan serta membutuhkan pelampiasan pelaku, faktor emosi juga dapat berperan dalam pemerkosaan dan kekerasan seksual.

Masalah eksternal, seperti kekerasan seksual. Keadaan yang mendukung, kehadiran korban yang secara halus dapat mendorong pelaku, atau faktor lain mungkin menjadi penyebabnya. Faktor lingkungan juga mempromosikan peran pelaku dan posisi korban dengan mengizinkan pelecehan seksual, seperti menjauh dari daerah yang sibuk dan tenang. Sebagai contoh, Wanita yang bepergian sendirian tanpa ditemani orang yang mereka cintai, misalnya, dipandang lemah atau lebih mungkin melakukan kejahatan. Wanita telah menunjukkan diri mereka sangat rentan dalam situasi ini. Wanita dikorbankan oleh jenis kelamin lain dalam masyarakat. Selain pertimbangan situasional atau lingkungan, ada faktor lain yang berperan ketika perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan untuk kepentingan pelaku. Salah satunya adalah efek dari kemajuan budaya yang

semakin mengabaikan aturan berpakaian. Dua faktor dapat disimpulkan sebagai penyebab kekerasan seksual terhadap anak. Yaitu, pengaruh eksternal dan internal. Posisi korban, peran pelaku, dan hubungan antara korban dan pelaku adalah contoh unsur internal. Pengaturan atau keadaan di mana kejahatan dilakukan seperti situasi adalah contoh pengaruh eksternal.

2.3.4 Dampak

Gangguan fisik dan emosional dialami oleh korban pelecehan seksual berbasis gender. Mereka menderita penyakit mental, stres, kecemasan, kesedihan, dan rasa bersalah. Ini menjelaskan Kondisi di mana seorang anak menghadapi agresi berbasis gender, sulit tidur, mimpi buruk, kunjungan medis, masalah dengan harga diri, dan ketakutan akan hal-hal seperti disfungsi seksual, nyeri kronis, obat-obatan, pikiran bunuh diri, keluhan tertentu, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Secara fisik, korban akan menderita sakit kepala, nafsu makan menurun, ketidaknyamanan genital atau seksual, dan depresi yang meningkat.

2.3.5 Tingkat Kekerasan Berdasarkan Data

No	Perkara	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak pidana
1.	KDRT	30	6
2.	Kekerasan Seksual	15	1
3.	Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur	76	25
4.	Kekerasan terhadap anak dibawah umur	15	5

Sumber : Unit PPA Polres Cimahi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Cimahi, pada tahun 2024 terdapat 136 kasus. Diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat 30 kasus. Kekerasan Seksual terdapat 15 kasus. Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terdapat 76 kasus. Kekerasan terhadap anak dibawah umur terdapat 15 kasus. Dari banyaknya kasus di Kota Cimahi, hanya 37 kasus yang diselesaikan secara tindak pidana. Diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat 6 kasus. Kekerasan Seksual terdapat 1 kasus. Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terdapat 25 kasus. Kekerasan terhadap anak dibawah umur terdapat 5 kasus. Rata – rata kasus terjadi di wilayah perkotaan. Berdasarkan data yang diperoleh, anak – anak dibawah umur menjadi kelompok rentan korban kekerasan seksual.

2.3.6 Upaya Penanganan

Pemerintah Kota Cimahi memiliki program edukasi kepada masyarakat termasuk pada jenjang pendidikan. Program tersebut bernama “PUSPA GOES TO SCHOOL” yaitu dengan memberikan edukasi kepada anak – anak di lingkungan sekolah. Memberikan wawasan kepada anak – anak untuk selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Tidak hanya kepada anak – anak, tenaga pendidik pun diberikan edukasi mengenai kekerasan seksual. Pada lingkungan masyarakat, melakukan kegiatan dengan RT/RW atau dengan karang taruna kelurahan. Selanjutnya menyisipkan dengan mendatangkan narasumber sesuai dengan bidangnya. Karena yang rentan terkena kekerasan seksual adalah remaja. Selain memberikan edukasi, Pemerintah membentuk satgas Perlindungan Anak Terpadu

berbasis Masyarakat (PATBM) dan satgas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Kebijakan dan hukum yang berlaku berdasarkan pada Bahwa dalam penanganan kasus berpedoman pada :

1. Undang - Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Undang - Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.
3. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak.
4. Undang - Undang nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual

Ditujukan kepada kaum rentan yaitu Perempuan, anak dibawah umur dan kaum disabilitas. Ruang lingkup nya tidak hanya kekerasan, meliputi verbal, catcalling dan bisa di proses di Undang – Undang TPKS, Pencabulan yang meliputi sentuhan fisik yang bukan seksual, Secara Elektronik berupa perekaman. Jika Undang – Undang sebelumnya diatas 18 tahun yang melakukan hubungan seksual tidak bisa diproses. Dengan adanya Undang – Undang ini dapat diproses.

Layanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menyediakan P2TP2A yaitu berupa rumah aman untuk para korban. Pelayanan konseling dan terapi yaitu

Memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan. Pendampingan hukum dengan Membantu korban dalam proses hukum dan memberikan dukungan. Pelayanan kesehatan yaitu Menyediakan layanan kesehatan untuk korban kekerasan. Pemberdayaan ekonomi yaitu Membantu korban memperoleh kemandirian ekonomi. Perlindungan dan pengamanan yaitu Menyediakan tempat penampungan dan perlindungan bagi korban. Selain itu P2TP2A menyediakan psikolog yang berperan untuk Mendengarkan dan memahami seperti Menyediakan ruang aman untuk korban berbagi pengalaman dan perasaan. Membantu mengurangi trauma korban dengan menggunakan teknik terapi untuk mengurangi gejala trauma, seperti PTSD (Gangguan Stres Pasca Trauma). Membantu membangun kepercayaan korban dengan membangun hubungan kepercayaan dengan korban untuk meningkatkan rasa aman. Selanjutnya mengembangkan strategi coping dengan Membantu korban mengembangkan strategi untuk menghadapi perasaan negatif.